

Dua Ajudan Johnny G Plate Diperiksa Penyidik Kejagung

JAKARTA (IM) - Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa enam orang saksi terkait kasus korupsi penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 2,3,4 dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Dua diantaranya merupakan ajudan dari eks Menkominfo Johnny G Plate yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini.

"Memeriksa enam orang saksi," kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana kepada para wartawan di Jakarta, Selasa (30/5).

Keenam saksi yang diperiksa itu adalah, MFM selaku Kepala Divisi Lastmile dan Backhaul BAKTI. AW selaku Ajudan Menteri Komunikasi dan Informatika.

NN selaku Ajudan Menteri Komunikasi dan Informatika. ES selaku Senior Man-

ager Sales PT Aplikasi Nusantara. I selaku Direktur PT JIG Nusantara Persada. Dan, BAA selaku Direktur PT Sarana Global Indonesia.

Mereka diperiksa terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2022. 31 May 2023

"Atas nama tersangka AAL, GMS, YS, MA, IH dan JGP," ujar Ketut.

Sebagai informasi, dengan adanya penambahan tersangka baru, Kejagung RI sudah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka di kasus korupsi proyek BTS 4G BAKTI Kemkominfo salah satunya eks Menkominfo, Johnny G Plate. ● han

2 Polhukam

FOTO: ANTARA



KONFERENSI PERS OMBUDSMAN RI

Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng (kiri) bersama Kepala Keasistenan Utama VI Ombudsman RI Elisha Luhulima (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Selasa (30/5). Dalam keterangannya Ombudsman RI memaparkan perkembangan laporan masyarakat atas nama Brigjen Pol Endar Priantoro terkait proses pemberhentiannya sebagai Direktur Penyelidikan KPK.

Hakim yang Putuskan Tunda Pemilu Tidak Memenuhi Panggilan KY

JAKARTA (IM) - Majelis Hakim yang memutuskan menunda pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, tidak datang memenuhi panggilan Komisi Yudisial (KY).

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) tersebut yakni hakim ketua hakim ketua Oyong dengan anggotanya H Bakri dan Domingus.

Sebelumnya, KY juga sudah melakukan pemanggilan secara sah dan patut terhadap Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus), Liliek Prisbawono pada Senin (29/5). Namun dia juga mangkir.

"Baik Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maupun Majelis Hakim tidak menghadiri pemanggilan sesuai dengan waktu yang dijadwalkan," ujar Juru Bicara MK, Miko Ginting, Selasa (30/5).

Menurutnya, mereka dipanggil untuk dimintai keterangannya soal putusan Partai Rakyat Adil dan Makmur (PRIMA). KY pun akan melakukan pemanggilan ulang terhadap

para pihak ini.

"Komisi Yudisial berharap para pihak dapat memenuhi pemanggilan karena forum etik di Komisi Yudisial berguna bagi para pihak untuk memberikan penjelasan yang utuh terhadap laporan masyarakat ini," ucapnya.

Miko melanjutkan, pemanggilan dan pengalihan keterangan ini dilakukan untuk penelusuran dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

"Pemanggilan ini dilakukan berdasarkan adanya laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran etik dan perilaku hakim, di mana Komisi Yudisial berwenang terkait dengan hal itu," katanya.

"Mengenai waktu pemanggilan, Komisi Yudisial akan menyampaikan kepada para pihak. Perkembangan terkait penanganan laporan masyarakat ini akan diinfokan lebih lanjut," tutupnya. ● lus

Mantan Komisioner Komnas HAM Ditunjuk Jadi Juruu Bicara Gerinda

JAKARTA (IM) - Mantan Komisioner Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) Munafrizal Manan ditunjuk menjadi juru bicara di Partai Gerindra. Ia ditunjuk menjadi juru bicara bidang HAM dan Konstitusi.

"Bappilu Gerindra mengangkat mantan komisioner Komnas HAM periode lalu Munafrizal sebagai Juru Bicara bidang HAM dan Konstitusi," kata Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Selasa (30/5).

Dasco menyebut bahwa penunjukan Munafrizal se-

bagai jubiir bidang HAM dan Konstitusi, sudah tepat. Sebab, Munafrizal memiliki pengalaman sebagai peneliti HAM dan lama bekerja di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Beliau juga sebagai aktivis 98, dan juga peneliti HAM tentu paham semua aspek soal penghormatan, perlindungan, pemenuhan, pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia," kata Dasco.

"Selain itu Munafrizal juga lama bekerja di Mahkamah Konstitusi, Tesis beliau di Melbourne University juga terkait HAM dan Konstitusi," imbuhnya.

Wakil Ketua DPR RI berharap, Munafrizal bisa melengkapi juru bicara yang sudah terbentuk. "Tentu dapat melengkapi juru bicara saat ini," ujar Dasco.

Dasco diketahui telah meresmikan Kantor Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu). ● han

Wapres Ma'ruf Amin Soroti Angka Pengangguran yang Mencapai 13,93%

Pengangguran terbuka pemuda mencapai 13,93%. Artinya, 14 dari 100 angkatan kerja pemuda tidak terserap dalam pasar kerja.

JAKARTA (IM) - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin memanggil sejumlah menteri untuk rapat koordinasi pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan di Istana Wapres, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (30/5).

Menteri yang hadir dalam rapat koordinasi itu di antaranya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Kemudian, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UMKM) Teten Masduki, Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid, dan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksiono.

Pada kesempatan itu, Wapres menyoroti Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda yang mencapai 13,93% menurut hasil survei angkatan kerja nasional (Satkernas) Agustus 2022.

"Artinya sekitar 14 dari

100 angkatan kerja pemuda tidak terserap dalam pasar kerja," kata Wapres Ma'ruf Amin, saat membuka rapat.

Selain itu, Ma'ruf Amin juga melakukan evaluasi pelaksanaan program serta rencana untuk mencapai target yang ada dalam Rencana Aksi Nasional yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Perpres 43 tahun 2022 tersebut.

Dalam arahnya, Ma'ruf Amin mengatakan, koordinasi strategis lintas sektor diharapkan dapat berjalan efektif, terutama dalam meningkatkan pelayanan kepemudaan. Hal ini terkait hasil capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), dimana pada tahun 2020 sebesar 51,00 mengalami penurunan dari tahun 2019 yang sebesar 52,61.

Walaupun penurunan ini merupakan dampak dari pandemi Covid-19, namun

Wapres mengingatkan bahwa pascapandemi harus diupayakan untuk mengejar ketinggalan target IPP dalam RPJMN 2020-2024 sebesar 57,67 di tahun 2024.

Pada 2021, IPP Indonesia mencapai 53,33, dengan adanya peningkatan nilai indeks pada domain Kesehatan dan Kesejahteraan dan domain Gender dan Diskriminasi.

Sementara pada domain Pendidikan dan Lapangan Kerja nilai indeksnya tetap dan terjadi penurunan pada domain Partisipasi dan Kepe-

mimpinan. Trend kenaikan nilai indeks IPP merupakan hal yang positif dan sebagai acuan untuk terus meningkatkan sesuai target 2024.

"Hal ini menjadi tantangan bagi kita semua untuk mencapainya. Salah satu strategi untuk mencapai target IPP adalah keterlibatan Pemerintah Daerah dalam pencapaian pembangunan pemuda di daerah. Target IPP secara nasional tidak akan tercapai tanpa pencapaian pembangunan pemuda di semua daerah," ujarnya. ● mei

Juru Sita PN Jakbar yang Terjaring OTT Bawas MA, Senior Berinisial S

JAKARTA (IM) - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat membenarkan adanya operasi tangkap tangan (OTT) seorang pegawai Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat oleh Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung (MA). Pegawai tersebut merupakan juru sita senior berinisial S.

"Yang bersangkutan adalah salah satu juru sita senior di PN Jakarta Barat," kata Humas PN Jakarta Barat Yulisar saat dikonfirmasi, Selasa (30/5).

Kendati demikian, Yulisar belum dapat menjelaskan secara rinci ihwal perkara tersebut. Ia bilang, oknum juru sita menunda eksekusi tanpa kewenangan alias berinisiatif sendiri. "Memang ada (diduga menerima suap) tapi tidak tahu jumlahnya karena belum ada penjelasan resmi dari Badan Pengawasan," tuturnya.

Bawas MA sendiri masih terus melakukan pengemban-

gan atas kasus ini. Pihak PN Jakarta Barat tengah menunggu keputusan Bawas MA.

"Karena yang tangkap Badan Pengawasan MA, PN Jakarta Barat menunggu aja keputusan MA," pungkasnya.

Sebelumnya, Bawas MA melakukan OTT terhadap seorang pegawai yang bertugas sebagai juru sita di PN Jakarta Barat pada Rabu 17 Mei 2023 di salah satu Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di kawasan Slipi, Jakarta Barat.

Ia diduga terlibat suap kepengurusan perkara. Bawas MA mengamankan sejumlah uang yang diduga berasal dari pemberi suap. Uang tersebut diduga untuk memperlancar proses eksekusi perdata.

Dari hasil pemeriksaan, ASN tersebut melanggar kode etik pasal 3 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SKKMA) tentang kode etik juru sita. ● mei

KORUPSI BANSOS BERAS

Petugas KPK Geledah Rumah di Tangsel dan Apartemen di Jakpus Milik Tersangka

JAKARTA (IM) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pengeledahan rumah di wilayah di Tangerang Selatan (Tangsel) dan apartemen di Jakarta Pusat (Jakpus), yang merupakan milik para tersangka korupsi penyaluran bansos beras di Kementerian Sosial (Kemensos), Senin (29/5) kemarin.

"Benar telah dilakukan pengeledahan tempat tinggal para pihak yang ditetapkan sbg tersangka dalam perkara ini. Antara lain rumah di Tangerang Selatan dan apartemen di Jakarta Pusat," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkat kepada wartawan, Selasa (30/5).

Sayangnya Ali tak menjelaskan secara detil rumah dan apartemen milik yang dikedekah itu milik siapa. Ali hanya mengatakan bahwa rumah dan apartemen itu milik para tersangka kasus dugaan korupsi penyaluran bansos beras di Kemensos.

Dari pengeledahan tersebut, tim berhasil mengamankan sejumlah dokumen dan bukti elektronik, yang diduga berkaitan dengan penyaluran

bansos beras. KPK saat ini sedang memverifikasi dokumen dan bukti elektronik tersebut.

"Hasil pengeledahan ditemukan beberapa dokumen dan juga bukti elektronik. Akan disita sebagai barang bukti dalam perkara dimaksud," ujarnya.

Seperti diketahui bahwa KPK saat ini sedang menyidik kasus baru terkait dugaan korupsi penyaluran bansos beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2020 sampai 2021 di Kemensos RI. Diperkirakan, akibat kasus tersebut negara dirugikan hingga ratusan miliar rupiah.

KPK dikabarkan telah menetapkan enam orang sebagai tersangka berkaitan dengan kasus ini. Hanya saja Ali beum mau mengungkapkan identitas para tersangka. Katanya, KPK baru akan mengumumkan secara resmi nama-nama para tersangka serta konstruksi perkara korupsi bansos di Kemensos ini saat proses penahanan. Saat ini, KPK masih fokus untuk mengumpulkan kembali bukti tambahan perkara ini. ● han

Dua Oknum Prajurit TNI Bawa 75 kg Sabu dan 40.000 Ekstasi Divonis Seumur Hidup

MEDAN (IM) - Majelis hakim di Pengadilan Negeri Militer 1-02 Medan, Sumatera Utara, menjatuhkan vonis seumur hidup kepada dua terdakwa, Sertu Yalpin Tarjun dan Pratu Rian Hermawan.

Keduanya terbukti bersalah membawa 75 kilogram narkoba jenis sabu dan 40.000 butir pil ekstasi.

"Selain itu, Sertu Yalpin Tarjun dan Pratu Rian Hermawan dikenakan pidana tambahan dipecat dari dinas militer TNI," ujar Hakim Ketua Kolonel Chk Asril Siagian, dilansir dari Antara, Selasa (30/5).

Majelis hakim menyebutkan bahwa kedua terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 114 ayat (1) juncto ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Yaitu secara bersama-sama menawarkan untuk

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba yaitu 75 kilogram sabu dan 40.000 butir pil ekstasi.

"Hal yang memberatkan kepada kedua terdakwa mengantar narkoba jenis sabu-sabu maupun ekstasi dengan tidak mendukung program pemerintah dalam memerangi narkoba untuk menyelamatan anak bangsa. Selain itu, pimpinan TNI juga melarang karena merusak jiwa, mental anak bangsa," ujar hakim saat membaca putusan.

Kedua terdakwa juga pernah mengantarkan sabu seberat 7 kg dan tidak menghiraukan lagi nilai-nilai yang sumpah majelis dan Sapta Marga dalam mematuhi peraturan pimpinan dan mengabaikannya.

"Sedangkan hal yang me-

ringankan kedua terdakwa berterus terang, mengakui kesalahan, dan pernah mengajukan diri dalam tugas operasi di NKRI," tutur Asril.

Hakim ketua mengatakan sementara untuk barang bukti disita dirampas negara dan dimusnahkan. Setelah mendengarkan amar putusan, majelis hakim memberikan hak kepada oditur, kedua terdakwa maupun penasihat hukum (PH) untuk pikir-pikir, banding maupun menerima putusan selama tujuh hari.

Untuk Sertu Yalpin melakukan pikir-pikir selama tujuh hari, sementara Pratu Rian melakukan banding dalam putusan. Sedangkan oditur melakukan pikir-pikir dalam putusan. Putusan ini lebih ringan dari oditur Mayor Chk R Panjaitan dalam menuntut kedua terdakwa dengan hukuman pidana mati. ● han



FOTO: ANT

RAKERNIS PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM REGIONAL SULAWESI
Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian LHK Laksmi Dhewanthi (tengah) bersama Wagub Sulteng Ma'Mun Amir (kedua kanan) dan para peserta menunjukkan simbol lingkungan usai pembukaan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Pengendalian Perubahan Iklim Regional Wilayah Sulawesi di Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (30/5). Rakernis diikuti 150 perwakilan Kementerian LHK dan Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi urusan kehutanan, lingkungan hidup, dan perencanaan daerah lingkup wilayah Sulawesi.

PENGUMUMAN
Guna memenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPPT"), Likuidator Perseroan Terbatas PT GODRA INVESTAMA MANDIRI ("Dalam Likuidasi") berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("Perseroan") yang ditunjuk berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 26 Januari 2023, Nomor 04, yang dibuat dihadapan HERU SISWANTO, SH, MKK, Notaris di Kota Tangerang, dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah melaksanakan Hak dan Kewajibannya kepada Kreditor maupun Debitor serta adanya sisa kekayaan Perseroan yang akan dibagikan kepada Pemegang Saham sebesar Rp. 544.980.001 (limaratus empatpuluh empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu satu Rupiah).
Jakarta, 31 Mei 2023
Likuidator
PT GODRA INVESTAMA MANDIRI
("Dalam Likuidasi")

mandiri
PENGUMUMAN
Telah dilakukan Pengalihan Piutang dan Atau Cessie fasilitas kredit di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pada Tanggal 30 Mei 2023 dengan keterangan sebagai berikut :
1.) Nama Debitur Hizman.
2.) Nilai Pengalihan Piutang (Cessie) sebesar Rp.297.386.991,07
3.) Cessionaris a.n Sdr. Hendy Sifran, beralamat di Citra Garden 3 Blok B-6 No. 37 RT 009 RW 013 Kel. Pegadungan Kec. Kalideres, Jakarta Barat.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka tmt 30 Mei 2023 seluruh kewajiban hutang kredit atas nama Hizman telah beralih kepada pihak ketiga sebagaimana disebutkan pada butir 3 diatas.
PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk.
Regional Retail Collection & Recovery Jakarta 2